

Penilaian		Bobot	Nilai		Indeks RB
			Pusat	Unit	
<b>A. PROSES</b>					
<b>I.</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<b>5.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>4.16</b>	<b>#DIV/0!</b>
	1 Tim Reformasi Birokrasi	1.00	#DIV/0!	0.78	#DIV/0!
	2 Road Map Reformasi Birokrasi	1.00	#DIV/0!	0.90	#DIV/0!
	3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	2.00	#DIV/0!	1.56	#DIV/0!
	4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	1.00	#DIV/0!	0.92	#DIV/0!
<b>II.</b>	<b>PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>5.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2.50</b>	<b>#DIV/0!</b>
	1 Harmonisasi	2.50	#DIV/0!	1.25	#DIV/0!
	2 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-	2.50	#DIV/0!	Penilaian Pusat	#DIV/0!
<b>III.</b>	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>	<b>6.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>6.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	1. Evaluasi	3.00	#DIV/0!	3.00	#DIV/0!
	2. Penataan	3.00	#DIV/0!	Penilaian Pusat	#DIV/0!
<b>IV.</b>	<b>PENATAAN TATALAKSANA</b>	<b>5.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>3.58</b>	<b>#DIV/0!</b>
	1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	1.25	#DIV/0!	0.94	#DIV/0!
	2 E-Governmen	1.50	#DIV/0!	0.67	#DIV/0!
	3 Keterbukaan Informasi Publik	1.25	#DIV/0!	1.25	#DIV/0!
	4 Kualitas Pengelolaan Arsip	1.00	0.00	Penilaian Pusat	0.00
<b>V.</b>	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>	<b>15.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>11.96</b>	<b>#DIV/0!</b>
	1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	1.00	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!
	2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas	2.00	#DIV/0!	Penilaian Pusat	#DIV/0!
	3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1.00	#DIV/0!	0.80	#DIV/0!
	4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	6.00	#DIV/0!	Penilaian Pusat	#DIV/0!
	5 Penetapan kinerja individu	2.00	#DIV/0!	1.89	#DIV/0!
	6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	1.00	#DIV/0!	0.89	#DIV/0!
	7 Pelaksanaan evaluasi jabatan	1.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	8 Sistem Informasi Kepegawaian	1.00	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!
<b>VI.</b>	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>	<b>6.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>5.74</b>	<b>#DIV/0!</b>
	1 Keterlibatan pimpinan	2.00	#DIV/0!	2.00	#DIV/0!
	2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	4.00	#DIV/0!	3.74	#DIV/0!
<b>VII.</b>	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>	<b>12.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>10.42</b>	<b>#DIV/0!</b>
	1 Gratifikasi	1.50	#DIV/0!	1.31	#DIV/0!
	2 Penerapan SPIP	1.50	0.00	1.50	0.75
	3 Pengaduan Masyarakat	2.00	#DIV/0!	1.69	#DIV/0!
	4 Whistle-Blowing System	1.50	#DIV/0!	0.69	#DIV/0!
	5 Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	#DIV/0!	1.38	#DIV/0!
	6 Pembangunan Zona Integritas	2.50	#DIV/0!	1.25	#DIV/0!
	7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1.50	0.00	Penilaian Pusat	0.00
<b>VIII.</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>6.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>3.96</b>	<b>#DIV/0!</b>
	1 Standar Pelayanan	1.00	#DIV/0!	0.73	#DIV/0!
	2 Budaya Pelayanan Prima	1.00	#DIV/0!	0.47	#DIV/0!
	3 Pengelolaan Pengaduan	1.50	#DIV/0!	1.40	#DIV/0!
	4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	1.50	#DIV/0!	0.59	#DIV/0!
	5 Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.00	#DIV/0!	0.78	#DIV/0!
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>48.31</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B. HASIL (40)</b>					
<b>I.</b>	<b>KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	14.00	0.00	Penilaian Pusat	0.00

	2.	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)	6.00	0.00	Penilaian Pusat	0.00
<b>II.</b>	<b>PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>		<b>#DIV/0!</b>
	1.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	7.00	0.00	Penilaian Pusat	0.00
	2.	Opini BPK	3.00	Blm Diisi	Penilaian Pusat	#DIV/0!
<b>III.</b>	<b>KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	10.00	0.00	Penilaian Pusat	0.00
<b>TOTAL HASIL</b>			<b>40.00</b>	<b>0.00</b>		<b>#DIV/0!</b>
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>			<b>#####</b>	<b>#DIV/0!</b>		<b>#DIV/0!</b>

Penilaian			
<b>A. JSES (60)</b>			
	<b>I.</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN (5)</b>	
		<b>1</b>	<b>Tim Reformasi Birokrasi (1)</b>
		a.	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk
		b.	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi
		c.	Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
		<b>2</b>	<b>Road Map Reformasi Birokrasi (1)</b>
		a.	Road Map telah disusun dan diformalkan
		b.	Road Map telah mencakup 8 area perubahan
		c.	Road Map telah mencakup "quick win"
		d.	Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi
		e.	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi
		<b>3</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)</b>

			a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
			b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja
			c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB
			d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			e. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?
			f. Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?
			g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan

		<b>4</b>	<b>Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)</b>
		a.	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
		b.	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan
		c.	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>
		<b>II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)</b>	
		<b>1</b>	<b>Harmonisasi (2,5)</b>
		a.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
		b.	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

		<b>2</b>	<b>Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan</b>
		a.	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi
		b.	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
		<b>III.</b>	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)</b>
		<b>1.</b>	<b>Evaluasi (3)</b>
		a.	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi
		b.	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
		c.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi
		d.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok

		e.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
		f.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
		g.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat
		h.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain
		i.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
		<b>2.</b>	<b>Penataan (3)</b>
			Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
		<b>IV. PENATAAN TATALAKSANA (5)</b>	
		<b>1</b>	<b>Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)</b>
		a.	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

			b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)
			c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
			d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
			<b>2 E-Government (2)</b>
			a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi
			b. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)
			c. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)
			d. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)
			<b>3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)</b>



		a.	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)
		b.	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
		c.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
		<b>4</b>	<b>Kualitas Pengelolaan Arsip</b>
		a.	Hasil Pengawasan Kearsipan
		<b>V.</b>	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)</b>
		<b>1</b>	<b>Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan</b>
		a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan
		b.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan
		c.	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan
		d.	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan
		e.	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan
		<b>2</b>	<b>Proses penerimaan pegawai transparan, objektif,</b>

			a.	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
			b.	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti ( <i>online</i> )
			c.	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif
			d.	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN
			e.	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
			<b>3</b>	<b>Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)</b>
			a.	Telah ada standar kompetensi jabatan
			b.	Telah dilakukan asesment pegawai
			c.	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi
			d.	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi

		e.	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
		f.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala
		<b>4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)</b>	
		a.	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan
		b.	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan
		c.	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif
		d.	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen
		e.	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka
		<b>5 Penetapan kinerja individu (2)</b>	
		a.	Penerapan Penetapan kinerja individu

			b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
			c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya
			d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
			e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.
			f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu

			g. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
		<b>6</b>	<b>Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku</b>
		a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan
		b.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan
		c.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
		d.	Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> )
		<b>7</b>	<b>Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)</b>
		a.	Informasi faktor jabatan telah disusun
		b.	Peta jabatan telah ditetapkan

			c. Kelas jabatan telah ditetapkan
			<b>8. Sistem Informasi Kepegawaian (1)</b>
			a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan
			b. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai
			c. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan
			d. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM
			<b>VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)</b>
			<b>1 Keterlibatan pimpinan (2)</b>
			a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
			b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
			c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
			<b>2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)</b>

		a.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
		b.	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun
		c.	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik
		d.	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit
		e.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala
<b>VII. PENGUATAN PENGAWASAN (12)</b>			
	<b>1</b>	<b>Gratifikasi (1,5)</b>	
		a.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi
		b.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>
		c.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
		e.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti
		f.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
		a.	Jumlah yang <b>harus</b> melaporkan
			- Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga
			- Eselon I/II
			- Lainnya

			b. Jumlah yang <b>sudah</b> melaporkan
		g.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
			a. Jumlah yang harus melaporkan
			- Jumlah Eselon III
			- Jumlah Eselon IV
			- Jumlah Fungsional Golongan IV
			b. Jumlah yang sudah melaporkan
		<b>2</b>	<b>Penerapan SPIP (1,5)</b>
		a.	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP
		b.	Telah dibangun lingkungan pengendalian
		c.	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi
		d.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
		e.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
		f.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern
		g.	Maturitas SPIP
		<b>3</b>	<b>Pengaduan Masyarakat (2)</b>
		a.	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat



			b. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
			c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
			c. Penanganan Pengaduan Masyarakat
			a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
			b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
			c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti
			d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
			e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
		<b>4</b>	<b>Whistle-Blowing System (1,5)</b>
			a. Telah terdapat <i>Whistle Blowing System</i>
			b. <i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan
			c. <i>Whistle Blowing System</i> telah diimplementasikan
			d. Telah dilakukan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>

		e.	Hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti
		<b>5</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)</b>
		a.	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan
		b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan
		c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
		e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
		<b>6</b>	<b>Pembangunan Zona Integritas (2,5)</b>
		a.	Telah dilakukan penancangan zona integritas
		b.	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas
		c.	Telah dilakukan pembangunan zona integritas
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan
		e.	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"
		<b>7</b>	<b>Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)</b>

			a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan
			b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.
			c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai
			d. APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko
			e. Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)
<b>VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)</b>			
<b>1 Standar Pelayanan (1)</b>			
			a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
			b. Standar pelayanan telah dimaklumkan

			c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
			d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
			e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP
			<b>2 Budaya Pelayanan Prima (1)</b>
			a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)
			b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
			c. Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

			d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
			e. Terdapat inovasi pelayanan
		<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pengaduan (1,5)</b>
			a. Terdapat media pengaduan pelayanan
			b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan
			c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan
			d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
			e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan
		<b>4</b>	<b>Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)</b>
			a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
			b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
		<b>5</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)</b>

			a.	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan
			b.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
			c.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>				
<b>B.</b>	<b>SIL (40)</b>			
	<b>I.</b>	<b>KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)</b>		
		1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)	
		2.	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)	
	<b>II.</b>	<b>PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)</b>		
		1.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)	
		2.	Opini BPK (3)	
	<b>III.</b>	<b>KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)</b>		
		1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)	
<b>TOTAL HASIL</b>				
<b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>				

Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!
	A/B/C		Blm Diisi	
a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	A/B/C		Blm Diisi	
a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	A/B/C		Blm Diisi	
a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!

<p>a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik</p> <p>b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik</p> <p>c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik</p> <p>d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
<p>a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi</p> <p>b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi</p> <p>c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi</p> <p>d. Seluruh aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
<p>a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan</p> <p>b. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan</p> <p>c. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan</p> <p>d. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
<p>a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.</p> <p>b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB.</p> <p>c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain</p> <p>d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
<p>a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi</p> <p>b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi</p> <p>c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi</p>	A/B/C		Blm Diisi	
<p>a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas</p> <p>b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas;</p> <p>c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor</p>	A/B/C		Blm Diisi	
<p>a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan</p> <p>b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan</p> <p>c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)</p>	A/B/C		Blm Diisi	



			#DIV/0!	#DIV/0!
<p>a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
<p>a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala</p> <p>b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait</p> <p>c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai</p> <p>d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu</p> <p>e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi</p>	A/B/C/D/E		Blm Diisi	
<p>a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan</p> <p>b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi</p> <p>c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan</p> <p>d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!
<p>a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron</p> <p>b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron</p> <p>c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron</p>	A/B/C		Blm Diisi	
<p>a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis</p> <p>b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai</p> <p>c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron</p>	A/B/C		Blm Diisi	

			#DIV/0!	#DIV/0!
a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	A/B/C		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!
a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi	A/B/C		Blm Diisi	
a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi	A/B/C		Blm Diisi	
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja	A/B/C		Blm Diisi	
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja	A/B/C		Blm Diisi	

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja	A/B/C		Blm Diisi	
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja	A/B/C		Blm Diisi	
a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja	A/B/C		Blm Diisi	
Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya/Tidak		Blm Diisi	
Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya/Tidak		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!
a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C/D		Blm Diisi	

a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!

Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C		Blm Diisi	
			<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 38/2015)	Indeks (0-100)		0	
			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C/D		Blm Diisi	
ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Ya/Tidak		Blm Diisi	
ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan	A/B/C/D		Blm Diisi	
			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan	A/B/C		Blm Diisi	
Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Ya/Tidak		Blm Diisi	
Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Ya/Tidak		Blm Diisi	
Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ya/Tidak		Blm Diisi	
Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Ya/Tidak		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Telah dilakukan asesment kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan asesment kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan asesment kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan asesment pegawai	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D		Blm Diisi	

<p>a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
<p>a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala</p> <p>b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala</p> <p>c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi</p>	A/B/C		Blm Diisi	
			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<p>Ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan</p>	Ya/Tidak		Blm Diisi	
<p>a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional</p> <p>b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas</p> <p>c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama</p> <p>d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
<p>Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif</p>	Ya/Tidak		Blm Diisi	
<p>Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen</p>	Ya/Tidak		Blm Diisi	
<p>Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb</p>	Ya/Tidak		Blm Diisi	
			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<p>a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai</p> <p>b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai</p> <p>c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai</p> <p>d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	

<p>a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi</p> <p>b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi</p> <p>c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi</p> <p>d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
<p>a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p> <p>b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p> <p>c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p> <p>d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
<p>a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan</p> <p>b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan</p> <p>c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran</p> <p>d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan</p> <p>e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan</p>	A/B/C/D/E		Blm Diisi	
<p>a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala</p> <p>b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala</p> <p>c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu</p>	A/B/C		Blm Diisi	
<p>a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai</p> <p>b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai</p> <p>c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai</p> <p>d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	



a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	A/B/C		Blm Diisi	
a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A/B/C/D		Blm Diisi	

a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	A/B/C/D		Blm Diisi	
Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya/Tidak		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!

a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D		Blm Diisi	
Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!
Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	A/B/C		Blm Diisi	
Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Ya/Tidak		Blm Diisi	
Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak		Blm Diisi	
Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak		Blm Diisi	
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:	%	#DIV/0!	#DIV/0!	
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999	Jumlah	0		
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002	Jumlah			
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015	Jumlah			
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016	Jumlah			
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004	Jumlah			

5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004				
6. SE MenPANRB No. 05/03/MENPAN/01/2005				
Penyampaian LHKASN diatur dalam:	Jumlah			
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999	%	#DIV/0!	#DIV/0!	
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002	Jumlah	0		
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015	Jumlah			
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015	Jumlah			
	Jumlah			
	Jumlah			
	Jumlah			
	Jumlah			
	Jumlah			
			0.00	0.00%
Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian				
b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian	A/B/C		Blm Diisi	
c. Seluruh organisasi belum membangun lingkungan pengendalian				
a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko				
b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko				
c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko	A/B/C/D		Blm Diisi	
d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko				
a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi				
b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi				
c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A/B/C/D		Blm Diisi	
d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi				
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait				
b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait				
c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait	A/B/C/D		Blm Diisi	
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI				
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala				
b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	A/B/C		Blm Diisi	
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern				
Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4/2016)	Skor (Skala 5)		0.00	
			#DIV/0!	#DIV/0!
Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Ya/Tidak		Blm Diisi	

a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti	A/B/C/D		Blm Diisi	
Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Jumlah			
	Jumlah			
	Jumlah			
a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C		Blm Diisi	
Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi	A/B/C/D		Blm Diisi	
Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	A/B/C		Blm Diisi	

a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	A/B/C/D		Blm Diisi	
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C		Blm Diisi	
a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A/B/C		Blm Diisi	
a. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C		Blm Diisi	
a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	A/B/C		Blm Diisi	
			0.00	0.00%

a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko	A/B/C/D		Blm Diisi	
Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP Nomor 16/2015)	Level (Skala 5)		0.00	
			#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!
Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan	A/B/C/D		Blm Diisi	

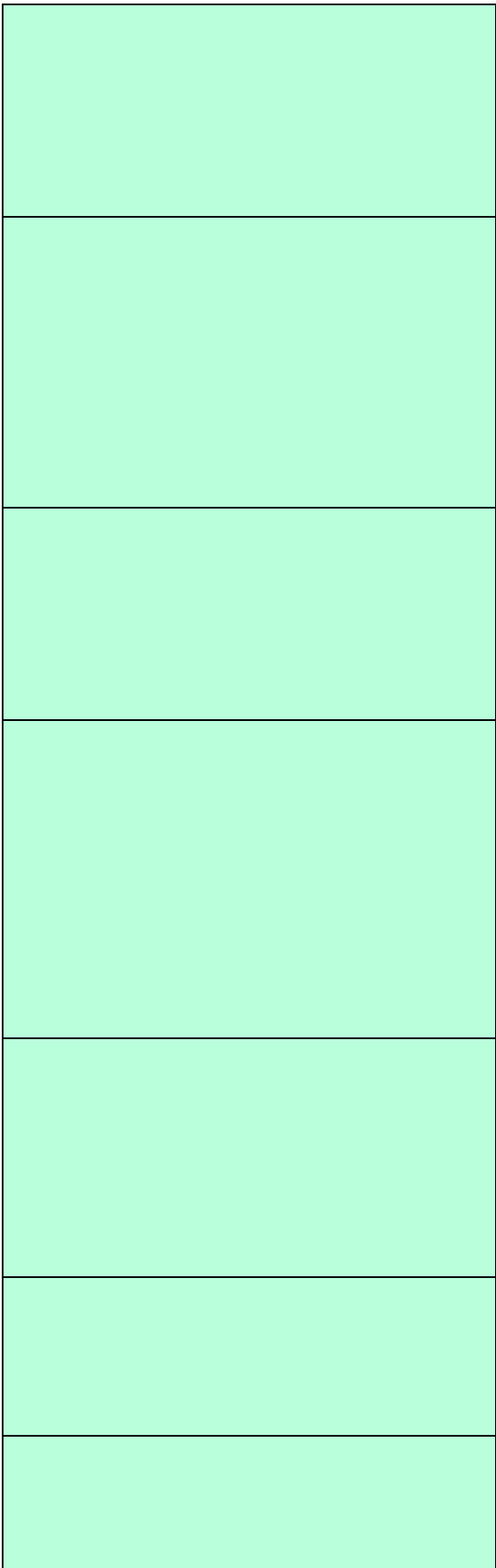
<p>a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan</p> <p>b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan</p> <p>c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan</p> <p>d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
<p>a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders</p> <p>b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders</p> <p>c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan</p>	A/B/C		Blm Diisi	
<p>a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala</p> <p>b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala</p> <p>c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP</p>	A/B/C		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
<p>a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p> <p>b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p> <p>c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p> <p>d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p>	A/B/C/D		Blm Diisi	
<p>a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)</p> <p>b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)</p> <p>c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media</p>	A/B/C		Blm Diisi	
<p>a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan</p> <p>b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan</p> <p>c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar</p>	A/B/C		Blm Diisi	

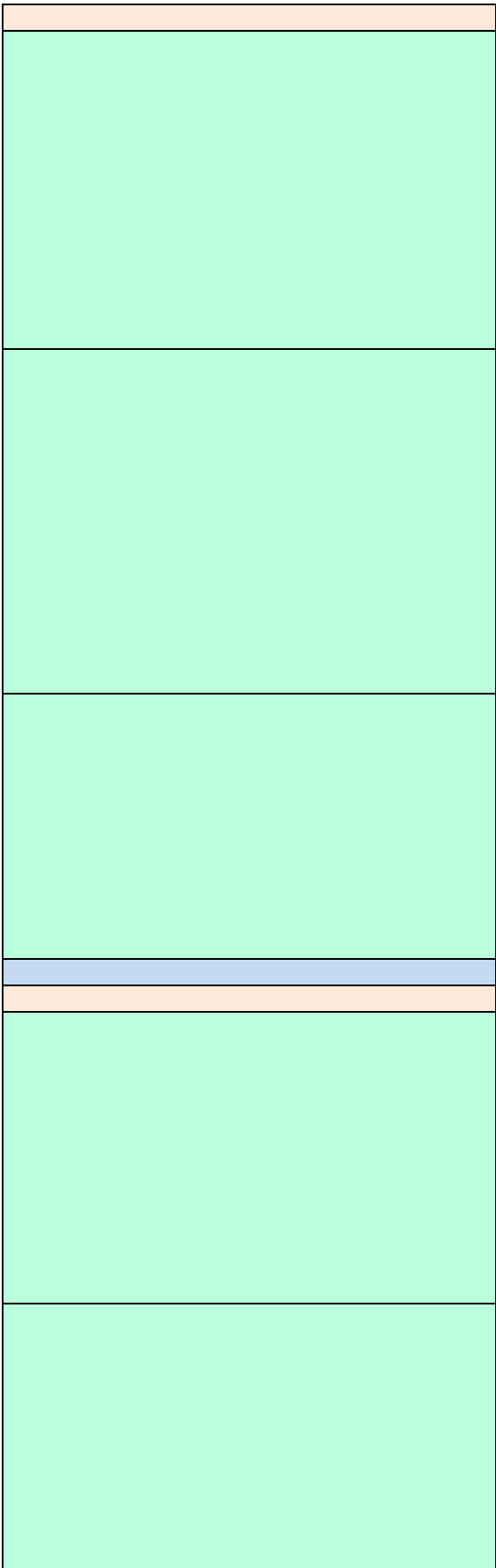


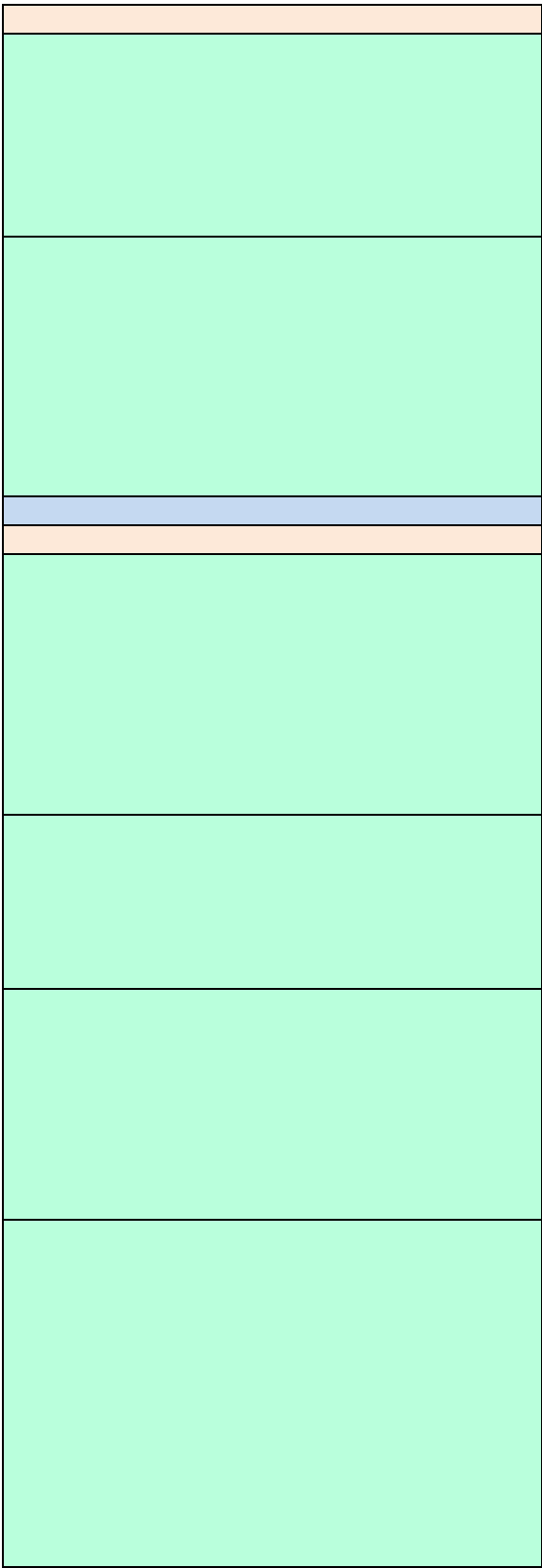
a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu	A/B/C/D		Blm Diisi	
Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan	A/B/C		Blm Diisi	
ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	A/B/C		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C		Blm Diisi	
Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A/B/C/D		Blm Diisi	
			#DIV/0!	#DIV/0!

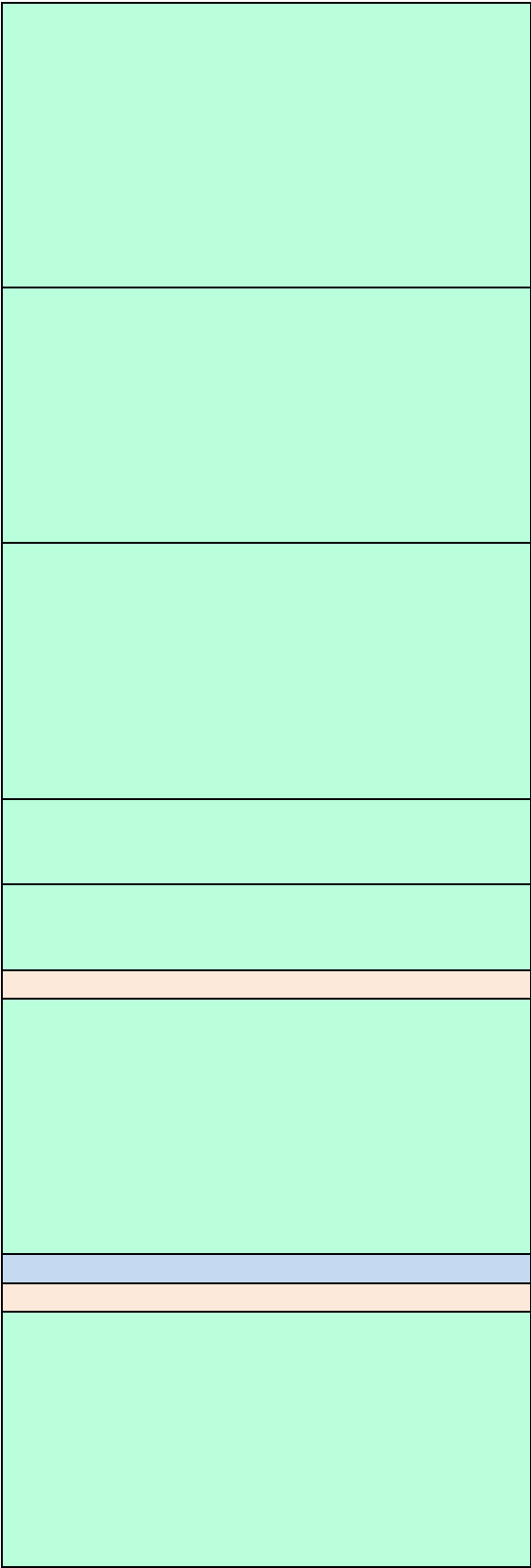
Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya/Tidak		Blm Diisi	
a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	A/B/C/D		Blm Diisi	
a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C		Blm Diisi	
			#DIV/0!	
			0.00	0.00%
Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0-100		0.00	0.00%
Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi	0-5		0.00	0.00%
			0.00	0.00%
Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi	0-4		0.00	0.00%
Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP/WTP-DPP/WDP/TMP /TW/Tidak Ada Laporan		Blm Diisi	#VALUE!
			0.00	0.00%
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	0-4		0.00	0.00%
			0.00	0.00%
			#DIV/0!	#DIV/0!

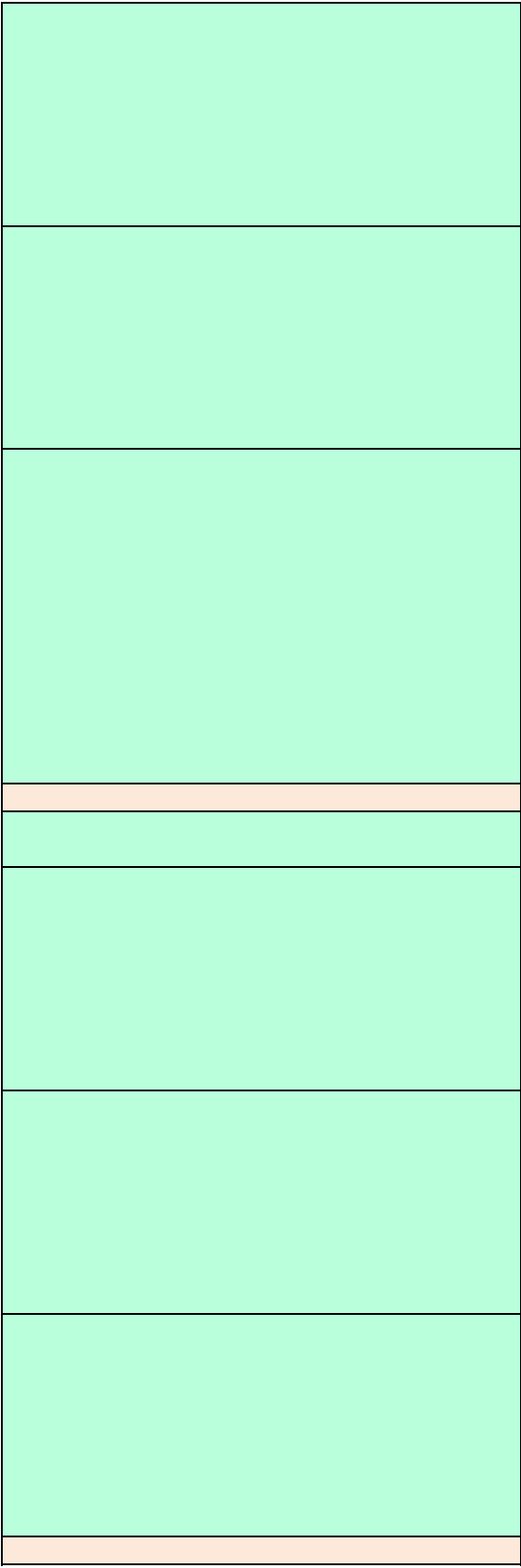




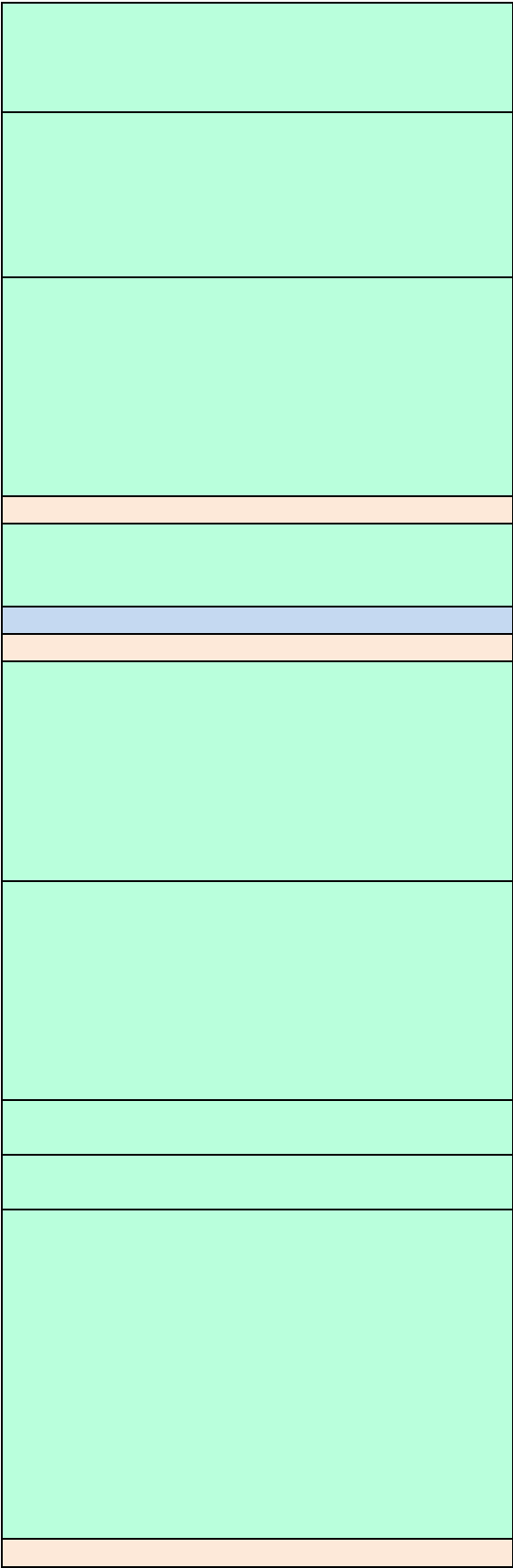




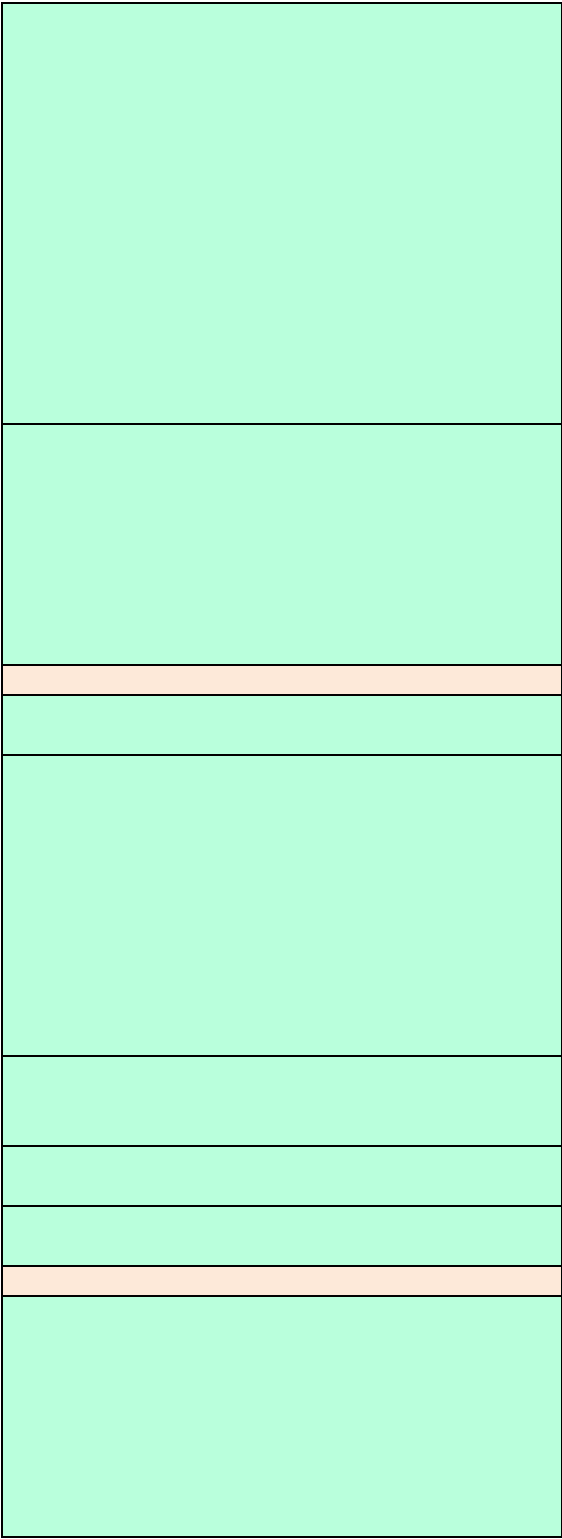


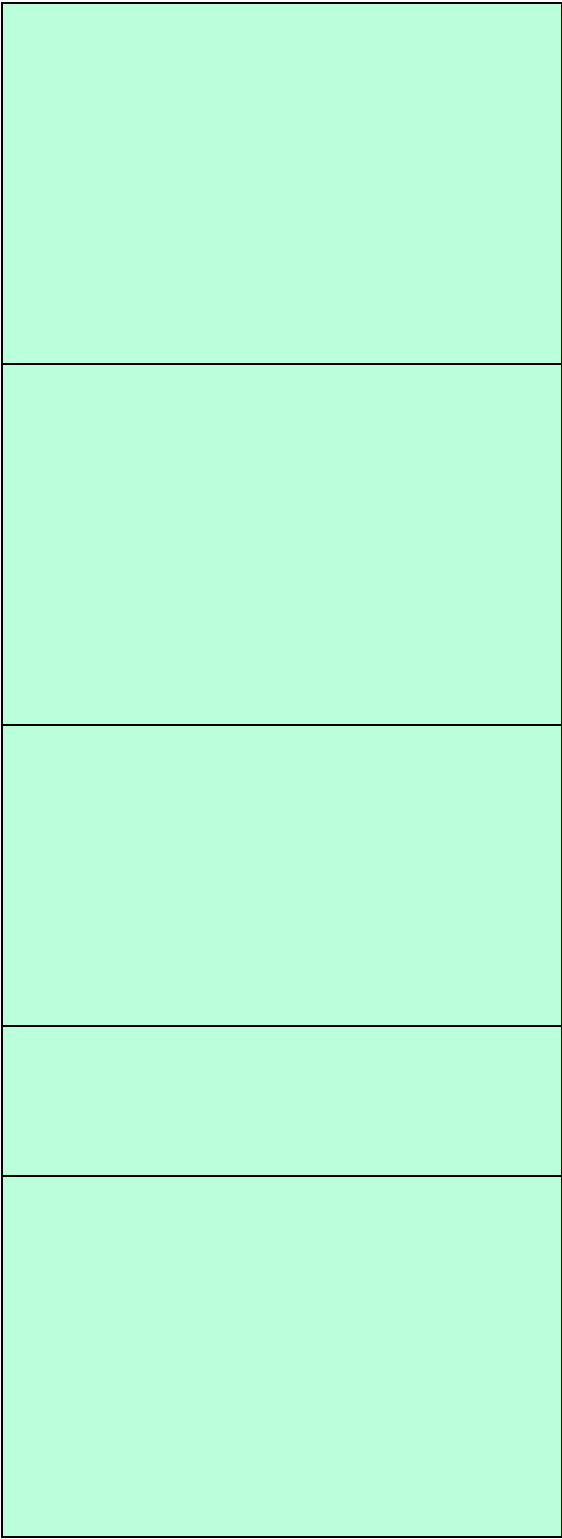


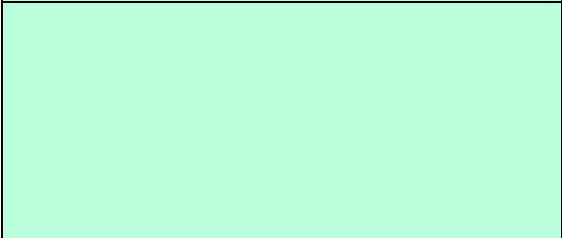
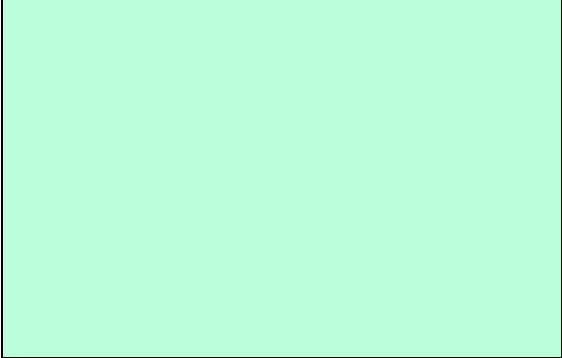


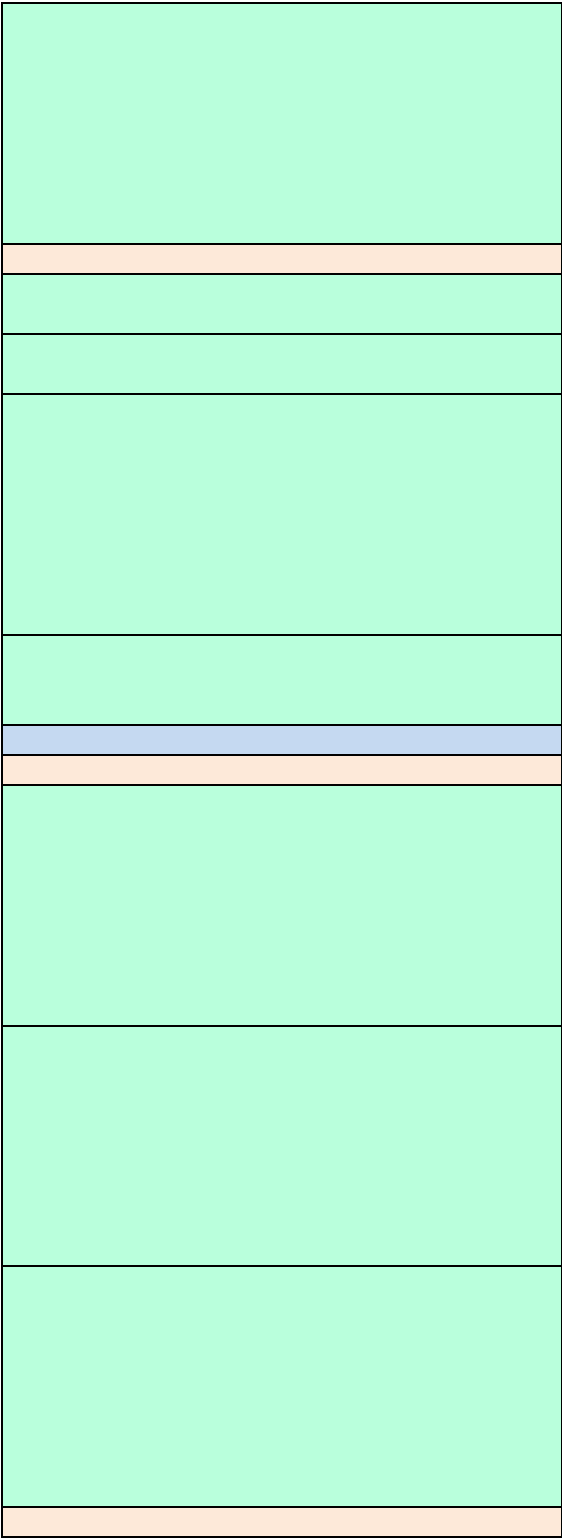












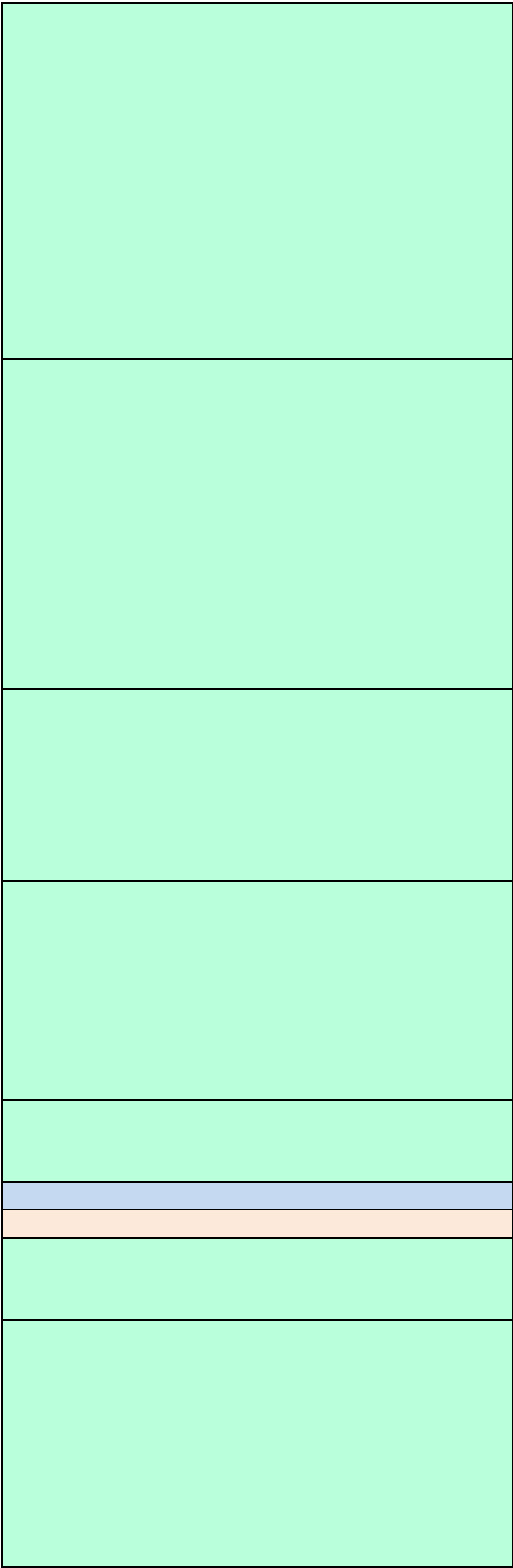


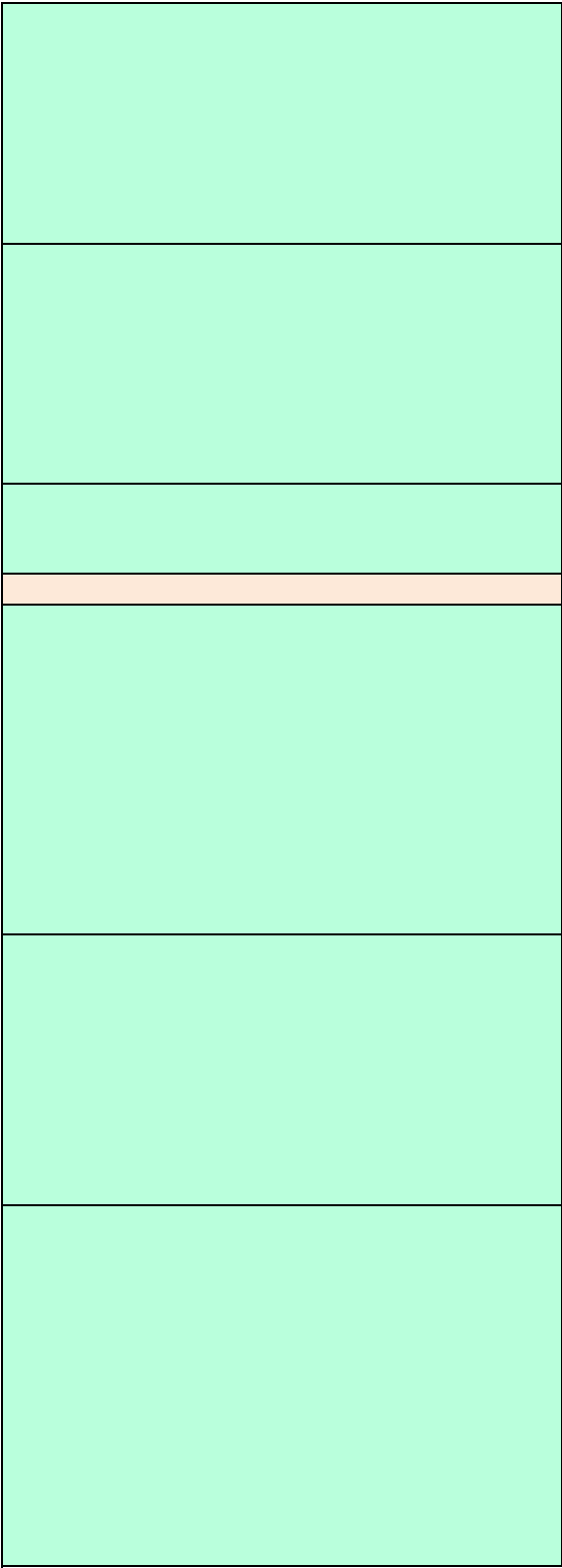


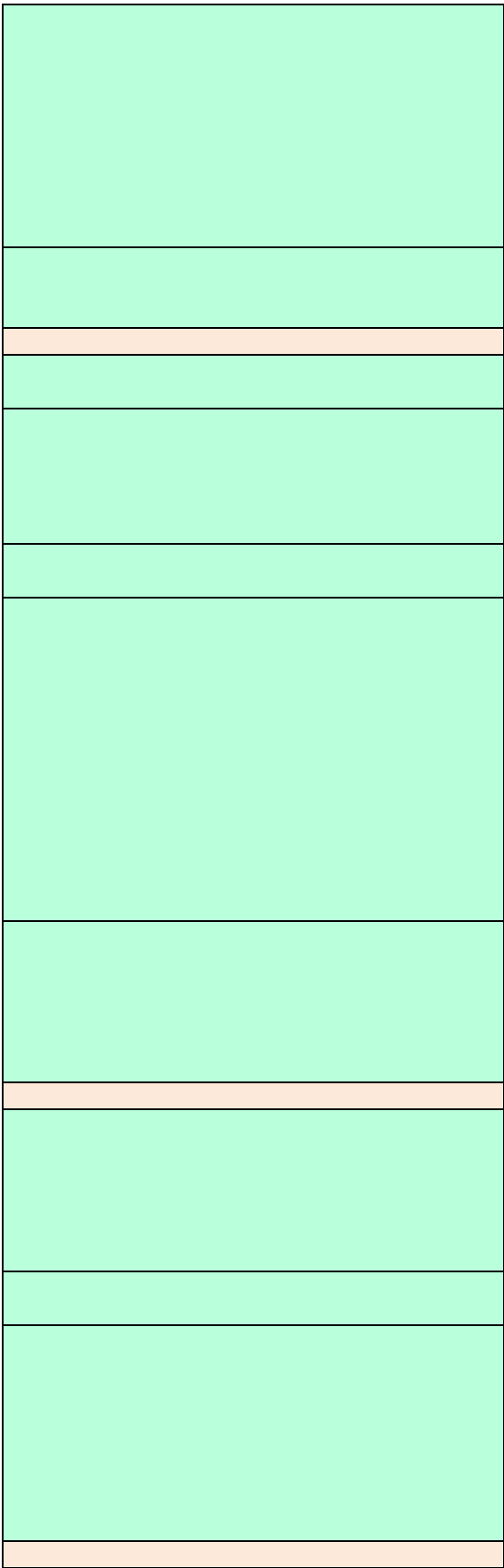


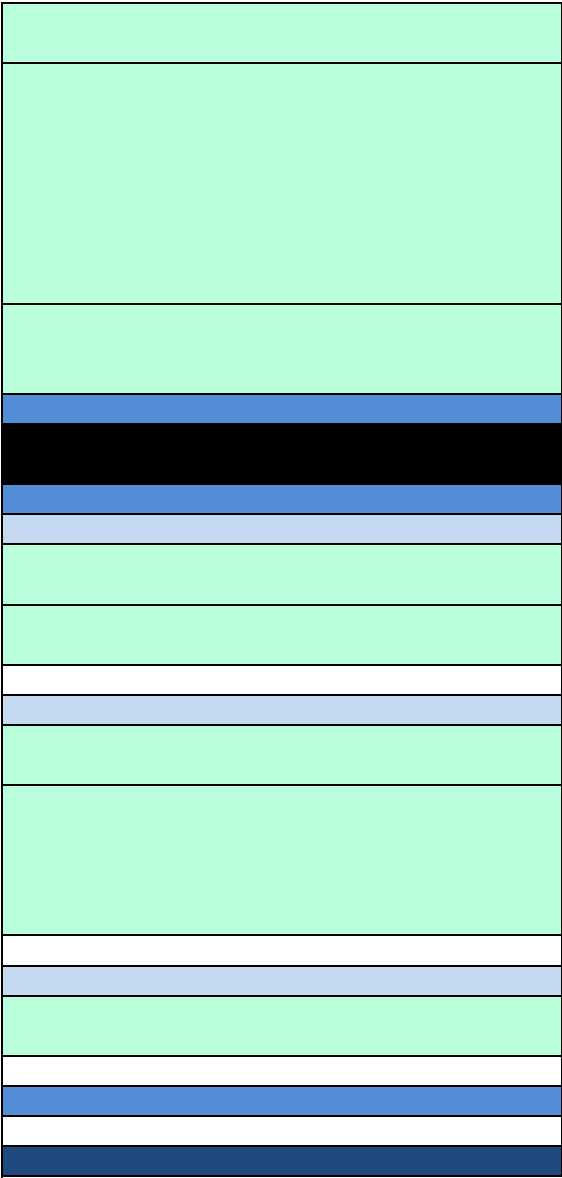












Penilaian			Bobot
<b>A. PROSES (60)</b>			
<b>I.</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN (5)</b>		<b>5.00</b>
	<b>1</b>	<b>Tim Reformasi Birokrasi (1)</b>	<b>1.00</b>
		a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	
		b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	
		c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	
	<b>2</b>	<b>Road Map Reformasi Birokrasi (1)</b>	<b>1.00</b>
		a. Road Map telah disusun dan diformalkan	
		b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan	
		c. Road Map telah mencakup "quick win"	
		d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	
		e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	
	<b>3</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)</b>	<b>2.00</b>

			a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	
			b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	
			c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB	
			d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
			e. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?	
			f. Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?	
			g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	
		<b>4</b>	<b>Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)</b>	<b>1.00</b>



		a.	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	
		b.	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	
		c.	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>	
	<b>II.</b>	<b>PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)</b>		<b>5.00</b>
	<b>1</b>	<b>Harmonisasi (2,5)</b>		<b>2.50</b>
		a.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	
		b.	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	
	<b>2</b>	<b>Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan</b>		<b>2.50</b>
		a.	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	

			b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	
	<b>III.</b>	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)</b>		<b>6.00</b>
		<b>1.</b>	<b>Evaluasi (3)</b>	<b>3.00</b>
			a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	
			b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	
			c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	
			d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	
			e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	

		f.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	
		g.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	
		h.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi	
		i.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	
		<b>2.</b>	<b>Penataan (3)</b>	<b>3.00</b>
			Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	
		<b>IV.</b>	<b>PENATAAN TATALAKSANA (5)</b>	<b>5.00</b>
		<b>1</b>	<b>Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)</b>	<b>1.25</b>
		a.	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	
		b.	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	
		c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	

		d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	
	<b>2</b>	<b>E-Government (2)</b>	<b>1.50</b>
		a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	
		b. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	
		c. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	
		d. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	
	<b>3</b>	<b>Keterbukaan Informasi Publik (1,5)</b>	<b>1.25</b>
		a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	
		b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	
	<b>4</b>	<b>Kualitas Pengelolaan Arsip</b>	<b>1.00</b>
		a. Hasil Pengawasan Kearsipan	
<b>V.</b>	<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)</b>		<b>15.00</b>
	<b>1</b>	<b>Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan</b>	<b>1.00</b>

			a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	
			b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	
			c. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	
			d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	
			e. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	
		<b>2</b>	<b>Proses penerimaan pegawai transparan, objektif,</b>	<b>2.00</b>
			a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	
			b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti ( <i>online</i> )	
			c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	
			d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	
			e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	
		<b>3</b>	<b>Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)</b>	<b>1.00</b>
			a. Telah ada standar kompetensi jabatan	
			b. Telah dilakukan asesment pegawai	

			c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	
			d. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	
			e. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	
			f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	
		<b>4</b>	<b>Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)</b>	<b>6.00</b>
			a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	
			b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	
			c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	
			d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	
			e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	
		<b>5</b>	<b>Penetapan kinerja individu (2)</b>	<b>2.00</b>

			a. Penerapan Penetapan kinerja individu	
			b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	
			c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	
			d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	
			e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	
			f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	
			g. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	
		<b>6</b>	<b>Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku</b>	<b>1.00</b>
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	

		b.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan	
		c.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	
		d.	Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( <i>reward</i> )	
		<b>7</b>	<b>Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)</b>	<b>1.00</b>
		a.	Informasi faktor jabatan telah disusun	
		b.	Peta jabatan telah ditetapkan	
		c.	Kelas jabatan telah ditetapkan	
		<b>8.</b>	<b>Sistem Informasi Kepegawaian (1)</b>	<b>1.00</b>
		a.	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	
		b.	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	
		c.	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	
		d.	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	
<b>VI.</b>			<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)</b>	<b>6.00</b>
		<b>1</b>	<b>Keterlibatan pimpinan (2)</b>	<b>2.00</b>



		a.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	
		b.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	
		c.	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	
	<b>2</b>	<b>Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)</b>		<b>4.00</b>
		a.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	
		b.	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	
		c.	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	
		d.	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	
		e.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	
	<b>VII.</b>	<b>PENGUATAN PENGAWASAN (12)</b>		<b>12.00</b>
	<b>1</b>	<b>Gratifikasi (1,5)</b>		<b>1.50</b>
		a.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	

		b.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>	
		c.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	
		e.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	
		f.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	
		a.	Jumlah yang <b>harus</b> melaporkan	
			- Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga	
			- Eselon I/II	
			- Lainnya	
		b.	Jumlah yang <b>sudah</b> melaporkan	
		g.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	
		a.	Jumlah yang harus melaporkan	
			- Jumlah Eselon III	
			- Jumlah Eselon IV	
			- Jumlah Fungsional Golongan IV	
		b.	Jumlah yang sudah melaporkan	
	<b>2</b>		<b>Penerapan SPIP (1,5)</b>	<b>1.50</b>
		a.	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	
		b.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	
		c.	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	
		d.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	
		e.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	

			f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	
			g. Maturitas SPIP	
		<b>3</b>	<b>Pengaduan Masyarakat (2)</b>	<b>2.00</b>
			a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	
			b. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	
			c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	
			c. Penanganan Pengaduan Masyarakat	
			a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti	
			b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang	
			c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	
			d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	
			e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	
		<b>4</b>	<b>Whistle-Blowing System (1,5)</b>	<b>1.50</b>
			a. Telah terdapat <i>Whistle Blowing System</i>	
			b. <i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan	
			c. <i>Whistle Blowing System</i> telah diimplementasikan	

			d. Telah dilakukan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>	
			e. Hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	
		<b>5</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)</b>	<b>1.50</b>
			a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	
			b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	
			c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	
			d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	
			e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	
		<b>6</b>	<b>Pembangunan Zona Integritas (2,5)</b>	<b>2.50</b>
			a. Telah dilakukan penancangan zona integritas	
			b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	
			c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas	
			d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	

		e.	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”	
	<b>7</b>	<b>Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)</b>		<b>1.50</b>
		a.	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	
		b.	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	
		c.	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	
		d.	APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko	
		e.	Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)	
	<b>VIII.</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)</b>		<b>6.00</b>
	<b>1</b>	<b>Standar Pelayanan (1)</b>		<b>1.00</b>
		a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	
		b.	Standar pelayanan telah dimaklumkan	
		c.	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	

			d. Dilakukan revidir dan perbaikin atas standar pelayanan	
			e. Dilakukan revidir dan perbaikin atas SOP	
		<b>2</b>	<b>Budaya Pelayanan Prima (1)</b>	<b>1.00</b>
			a. Telah dilakukin sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	
			b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	
			c. Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	
			d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	
			e. Terdapat inovasi pelayanan	
		<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pengaduan (1,5)</b>	<b>1.50</b>
			a. Terdapat media pengaduan pelayanan	
			b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan	

			c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	
			d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	
			e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	
		<b>4</b>	<b>Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)</b>	<b>1.50</b>
			a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	
			b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	
			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	
		<b>5</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)</b>	<b>1.00</b>
			a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	
			b. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	
			c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>				

Penjelasan	1	2	3	4
	#REF!	#REF!	#REF!	4.16
	#REF!	#REF!	#REF!	0.78
a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
	#REF!	#REF!	#REF!	0.90
Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	#REF!	#REF!	#REF!	0.5
a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	#REF!	#REF!	#REF!	1
	#REF!	#REF!	#REF!	1.56



a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh aktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
a. Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan				
a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor				
a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi				
a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor				
a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	#REF!	#REF!	#REF!	1
	#REF!	#REF!	#REF!	0.92

a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	#REF!	#REF!	#REF!	0.75
a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	#REF!	#REF!	#REF!	1
	#REF!	#REF!	#REF!	2.50
	#REF!	#REF!	#REF!	1.25
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	#REF!	#REF!	#REF!	0.5
a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	#REF!	#REF!	#REF!	0.5
a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan				

a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan				
	#REF!	#REF!	#REF!	6.00
	#REF!	#REF!	#REF!	3.00
a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja	#REF!	#REF!	#REF!	Blm Diisi

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja				
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja	#REF!	#REF!	#REF!	1
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja				
a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja				
b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja	#REF!	#REF!	#REF!	1
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja				
Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	#REF!	#REF!	#REF!	1
Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi				
b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi				
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi				
d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi				
	#REF!	#REF!	#REF!	3.58
	#REF!	#REF!	#REF!	0.94
a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi				
b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	#REF!	#REF!	#REF!	1
c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi				
d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi				
a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP				
b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP				
a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)				
b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)				
d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)				

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>0.67</b>
Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	#REF!	#REF!	#REF!	0
a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>1.25</b>
Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses	#REF!	#REF!	#REF!	1
b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses	#REF!	#REF!	#REF!	1
c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses	#REF!	#REF!	#REF!	1
d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala	#REF!	#REF!	#REF!	1
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala	#REF!	#REF!	#REF!	1
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	#REF!	#REF!	#REF!	1
	#REF!	#REF!	#REF!	1.96
Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 38/2015)	#REF!	#REF!	#REF!	1.00
	#REF!	#REF!	#REF!	1.00

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan				
b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan	#REF!	#REF!	#REF!	1
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan				
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan				
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi				
b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi				
d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan				
ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	#REF!	#REF!	#REF!	1
ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi				
b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi				
d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum				
a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb)				
b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor)				
c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan				
Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.				
Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.				
Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.				
Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah				
	#REF!	#REF!	#REF!	0.80
Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Telah dilakukan asesment kepada seluruh pegawai				
b. Telah dilakukan asesment kepada sebagian besar pegawai	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
c. Telah dilakukan asesment kepada sebagian kecil				

a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	#REF!	#REF!	#REF!	Blm Diisi
a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	#REF!	#REF!	#REF!	1
ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan				
a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi				
Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif				
Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen				
Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb				
	#REF!	#REF!	#REF!	1.89

a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai				
	#REF!	#REF!	#REF!	0.89
ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku				



a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>0.00</b>
Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	#REF!	#REF!	#REF!	0
a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan				
a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan				
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>1.00</b>
Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	#REF!	#REF!	#REF!	1
Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	#REF!	#REF!	#REF!	1
Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen	#REF!	#REF!	#REF!	1
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>5.74</b>
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>2.00</b>

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	#REF!	#REF!	#REF!	1
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>3.74</b>
a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	#REF!	#REF!	#REF!	1
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>8.93</b>
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>1.31</b>
Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi				

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	#REF!	#REF!	#REF!	0.5
Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	#REF!	#REF!	#REF!	1
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005				
Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015				
	#REF!	#REF!	#REF!	1.50
Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	#REF!	#REF!	#REF!	1.00
a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangun lingkungan pengendalian	#REF!	#REF!	#REF!	1.00
a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko	#REF!	#REF!	#REF!	1.00
a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan	#REF!	#REF!	#REF!	1.00
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	#REF!	#REF!	#REF!	1.00

a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala				
b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	#REF!	#REF!	#REF!	Blm Diisi
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern				
Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4/2016)				
	#REF!	#REF!	#REF!	1.69
Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan				
a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat				
b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat				
d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat				
a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti				
b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti				
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti				
d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti				
Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	#REF!	#REF!	#REF!	0.70
	#REF!	#REF!	#REF!	0
	#REF!	#REF!	#REF!	0
	#REF!	#REF!	#REF!	0
a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala				
b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala	#REF!	#REF!	#REF!	1
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi				
Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	#REF!	#REF!	#REF!	1
	#REF!	#REF!	#REF!	0.69
Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System				
a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi				
b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi				
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi				
Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	#REF!	#REF!	#REF!	0

a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	#REF!	#REF!	#REF!	0.5
a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>1.38</b>
Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan				
a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>1.25</b>
Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan				
Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan				
a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	#REF!	#REF!	#REF!	0.5
a. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring dan evaluasi				

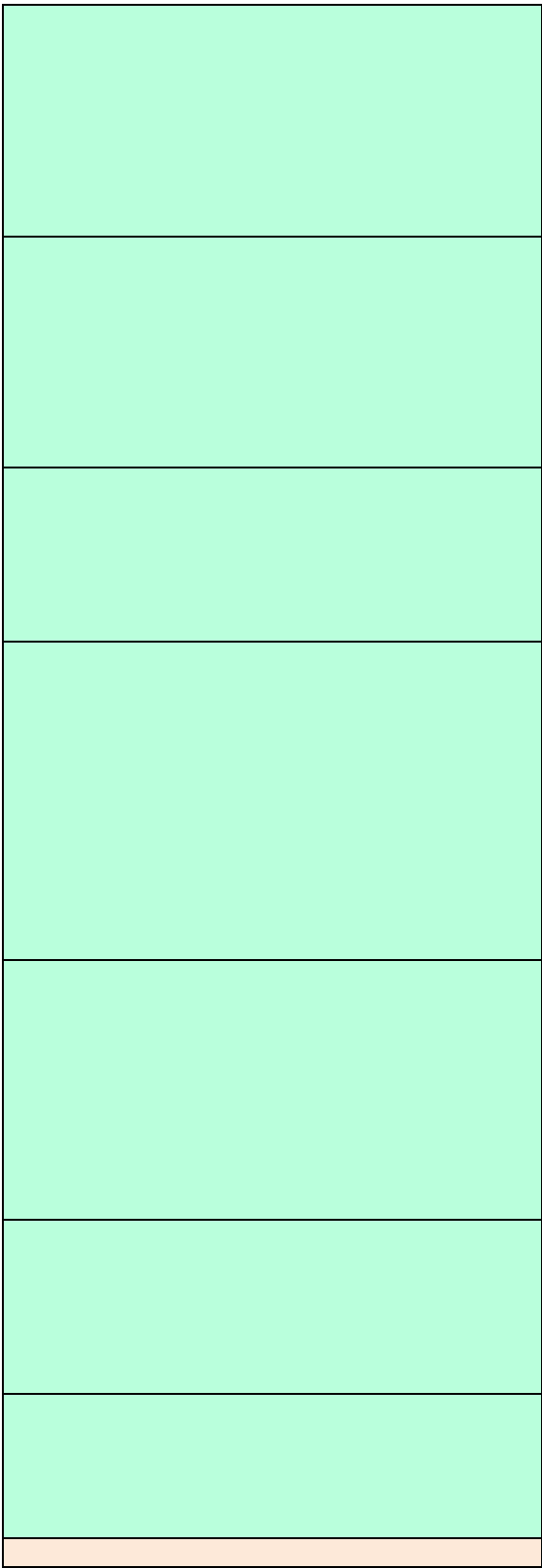
a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK				
a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir				
a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas				
a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran				
a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko				
Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP Nomor				
	#REF!	#REF!	#REF!	3.96
	#REF!	#REF!	#REF!	0.73
Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	#REF!	#REF!	#REF!	0.67

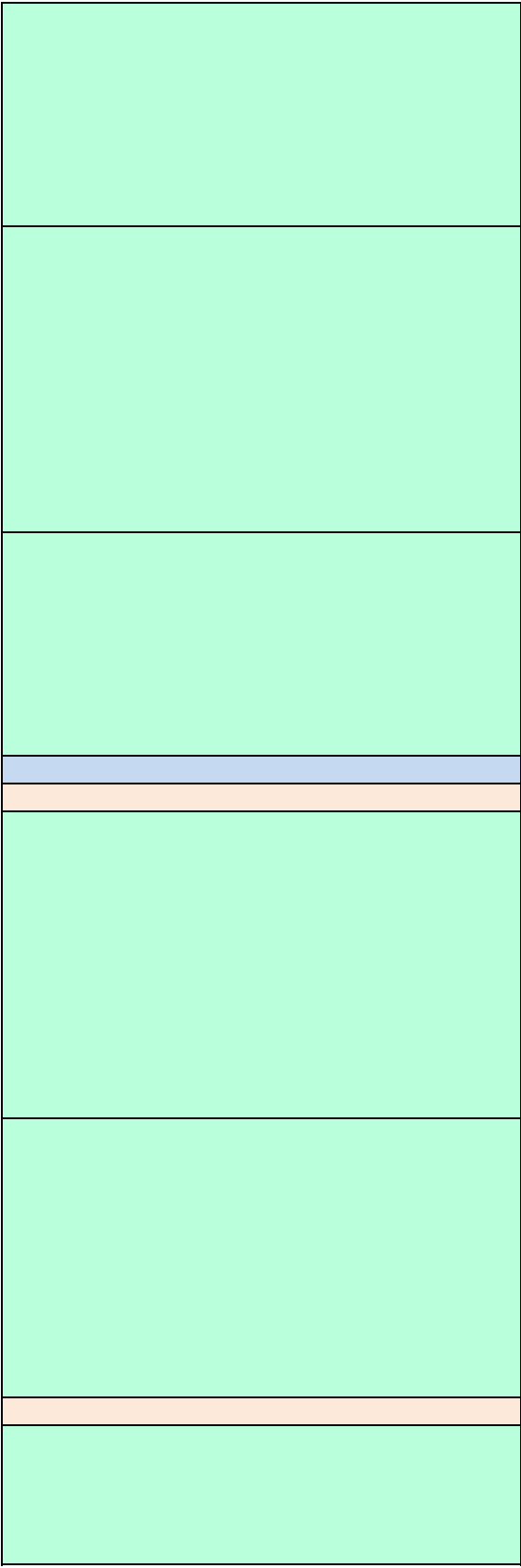
a. Dilakukan revidu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders				
b. Dilakukan revidu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders	#REF!	#REF!	#REF!	0.5
c. Belum dilakukan revidu dan perbaikan atas standar pelayanan				
a. Dilakukan revidu dan perbaikan SOP secara berkala				
b. Dilakukan revidu dan SOP secara tidak berkala	#REF!	#REF!	#REF!	0.5
c. Belum ada revidu dan perbaikan SOP				
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>0.47</b>
a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima				
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima				
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima				
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)				
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)	#REF!	#REF!	#REF!	0.5
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media				
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan				
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan	#REF!	#REF!	#REF!	0.5
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar				
a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu				
b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu				
d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu				
Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	#REF!	#REF!	#REF!	0
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>1.40</b>
Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif				
b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya	#REF!	#REF!	#REF!	1
c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan				

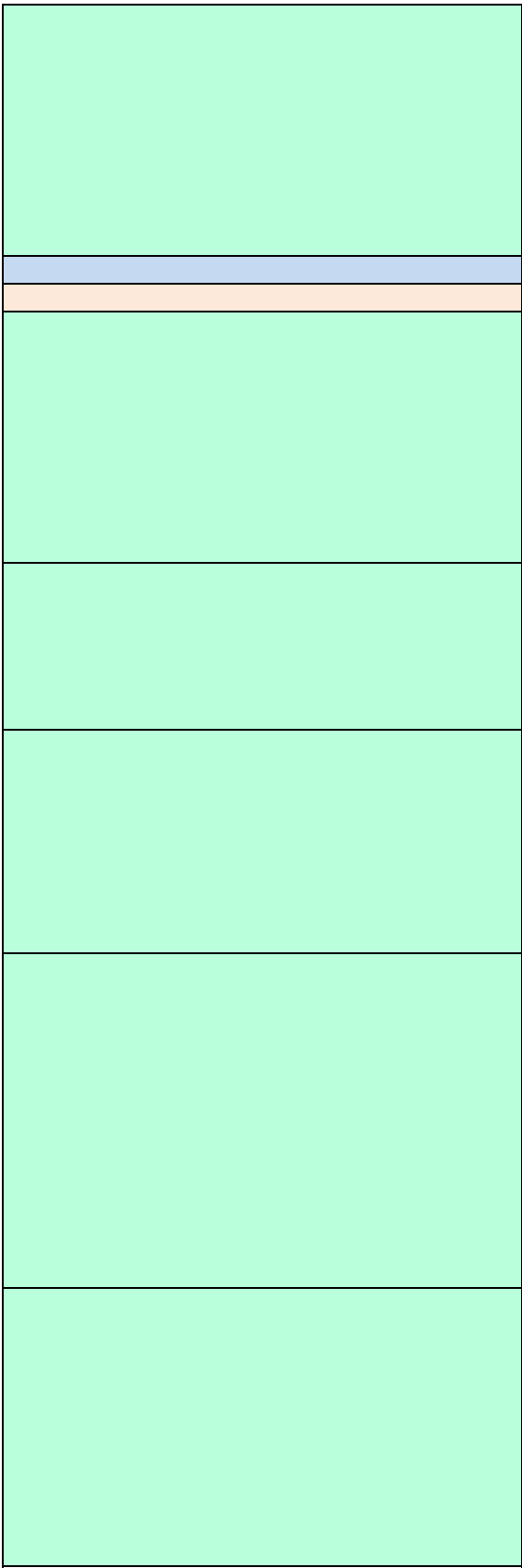
ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	#REF!	#REF!	#REF!	1
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>0.59</b>
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	#REF!	#REF!	#REF!	0.5
Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	#REF!	#REF!	#REF!	0
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	#REF!	#REF!	#REF!	0.67
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>0.78</b>
Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	#REF!	#REF!	#REF!	1
a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	#REF!	#REF!	#REF!	0.33
a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	#REF!	#REF!	#REF!	1
	#REF!	#REF!	#REF!	<b>46.82</b>

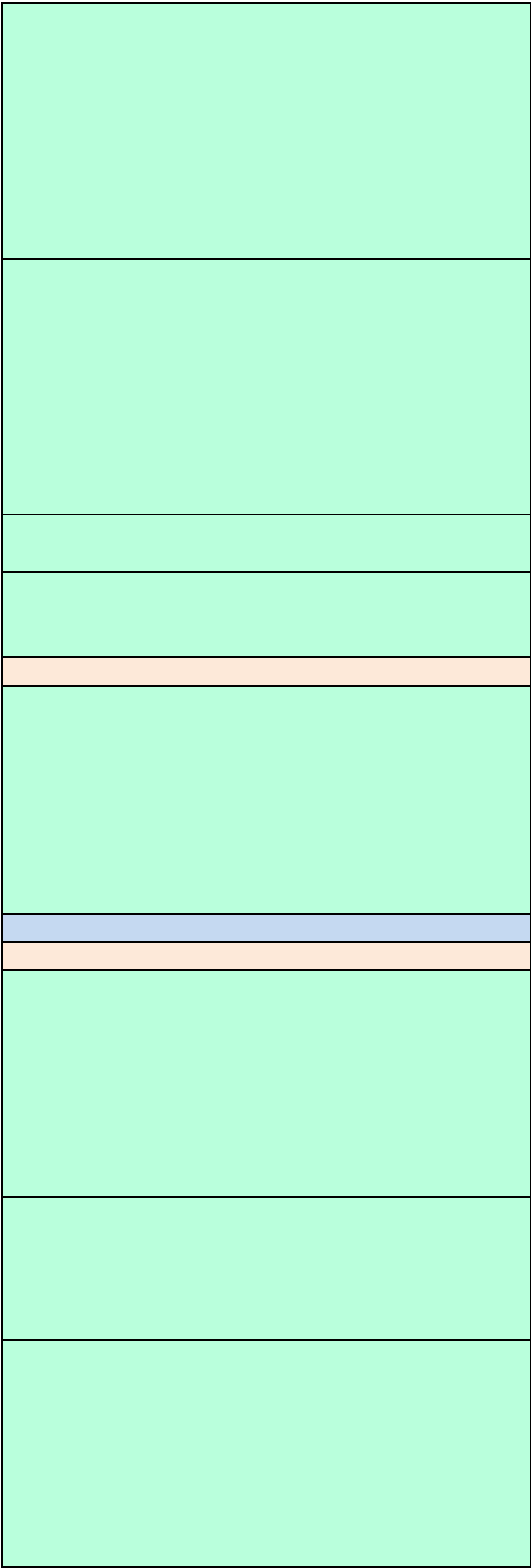


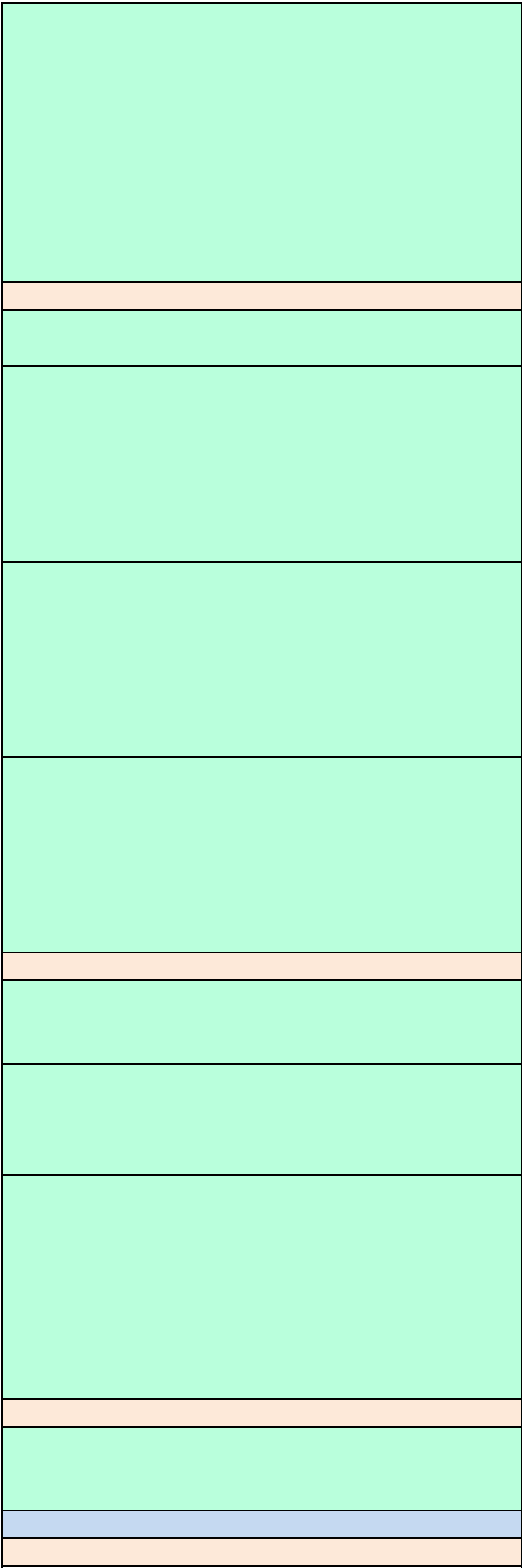
Catatan/Keterangan/ Penjelasan



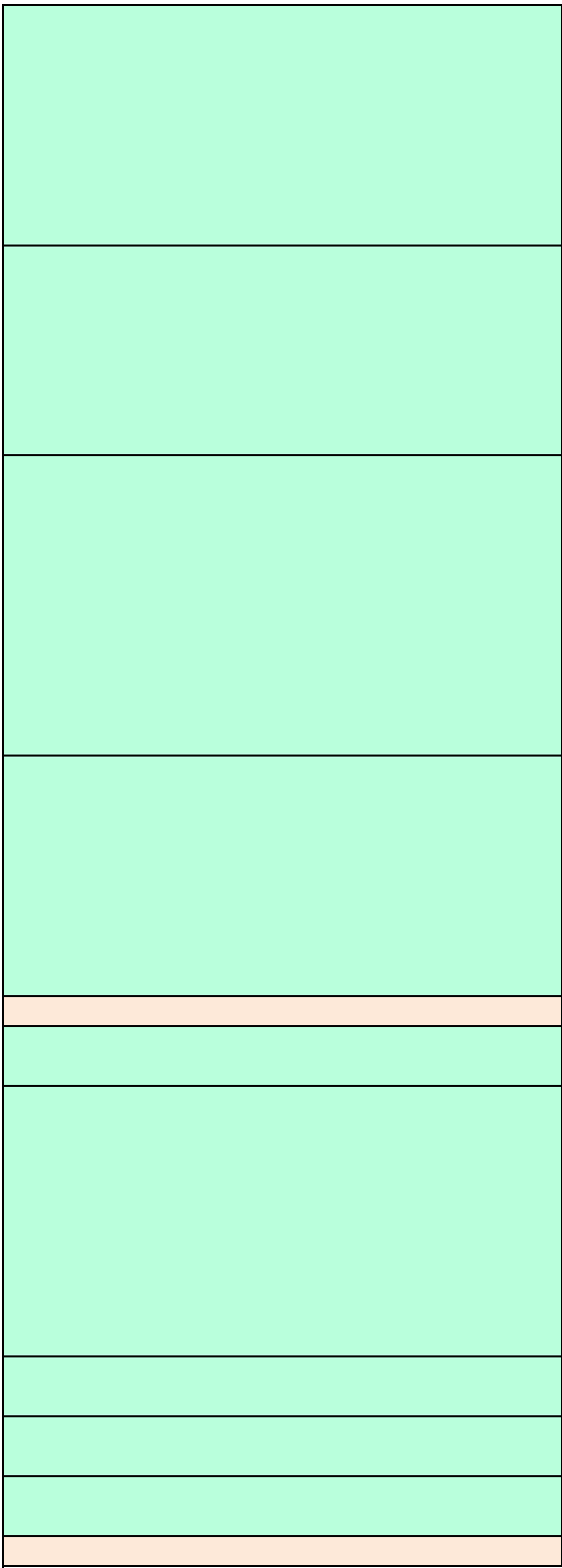




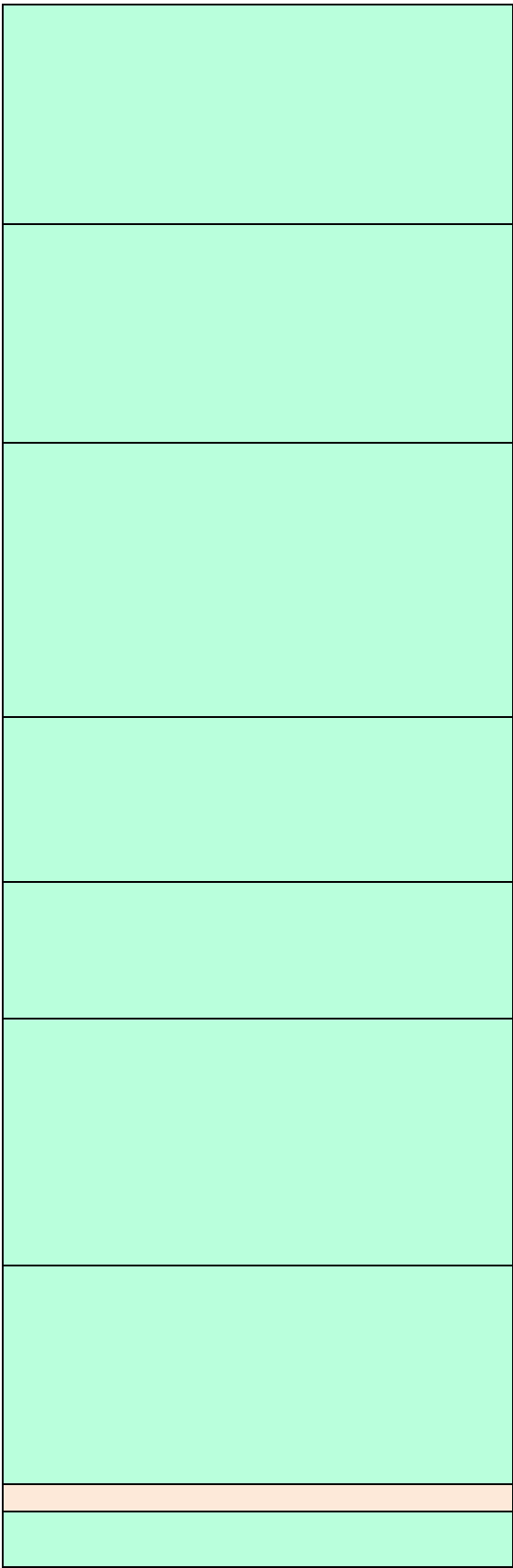


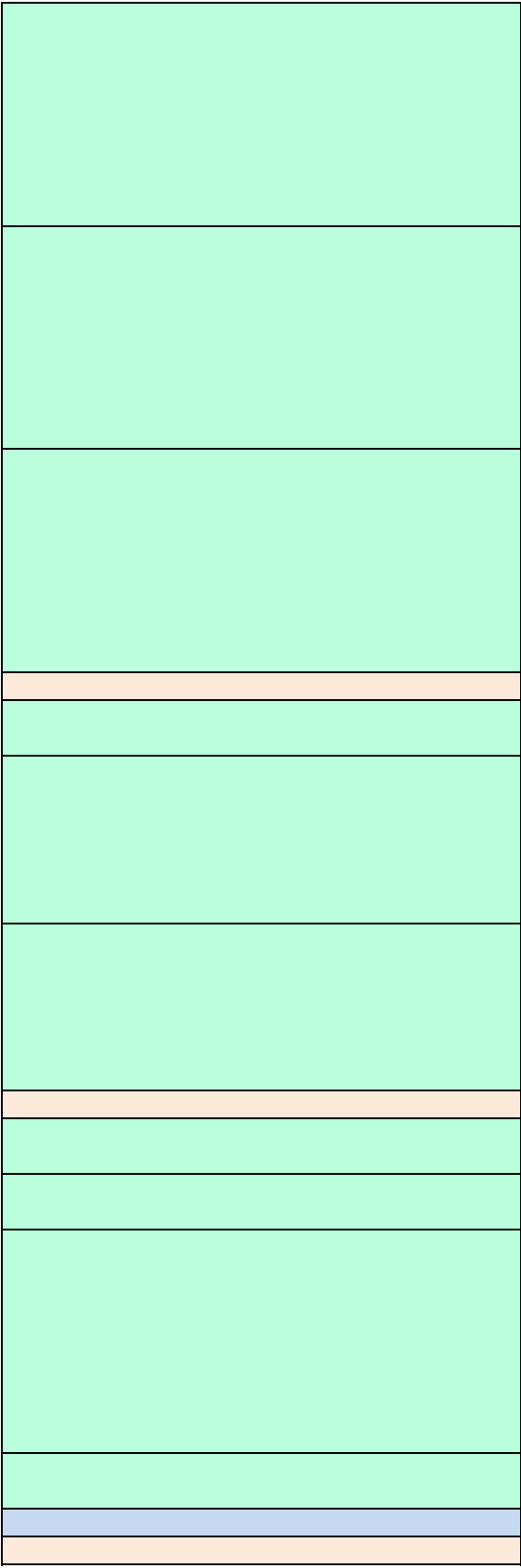


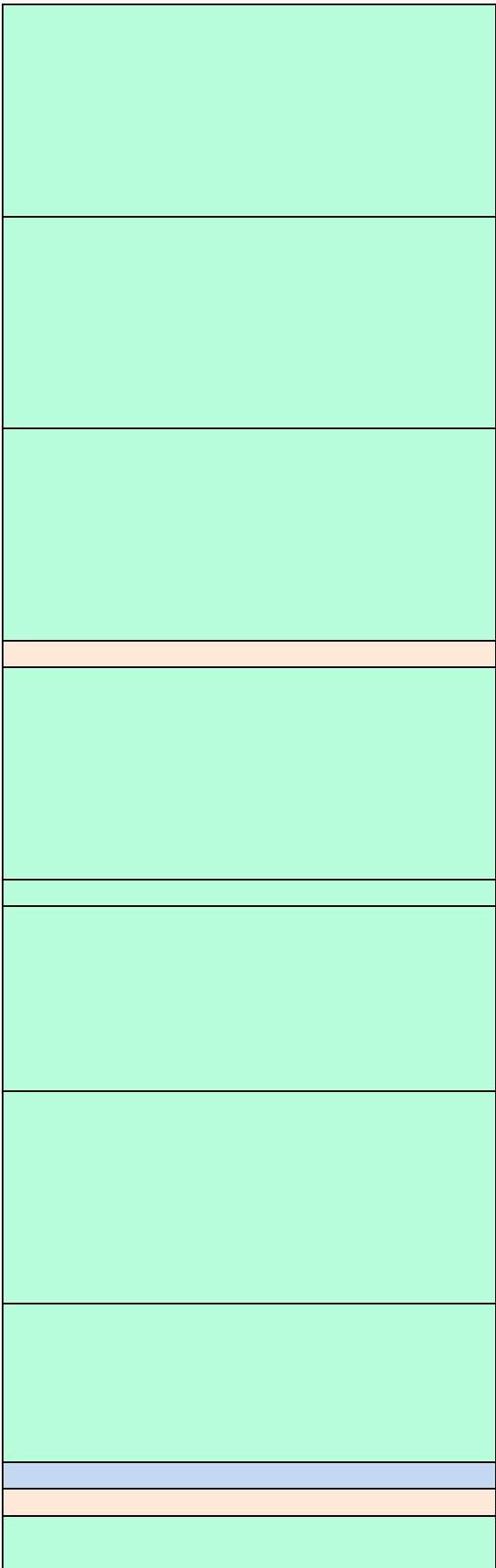






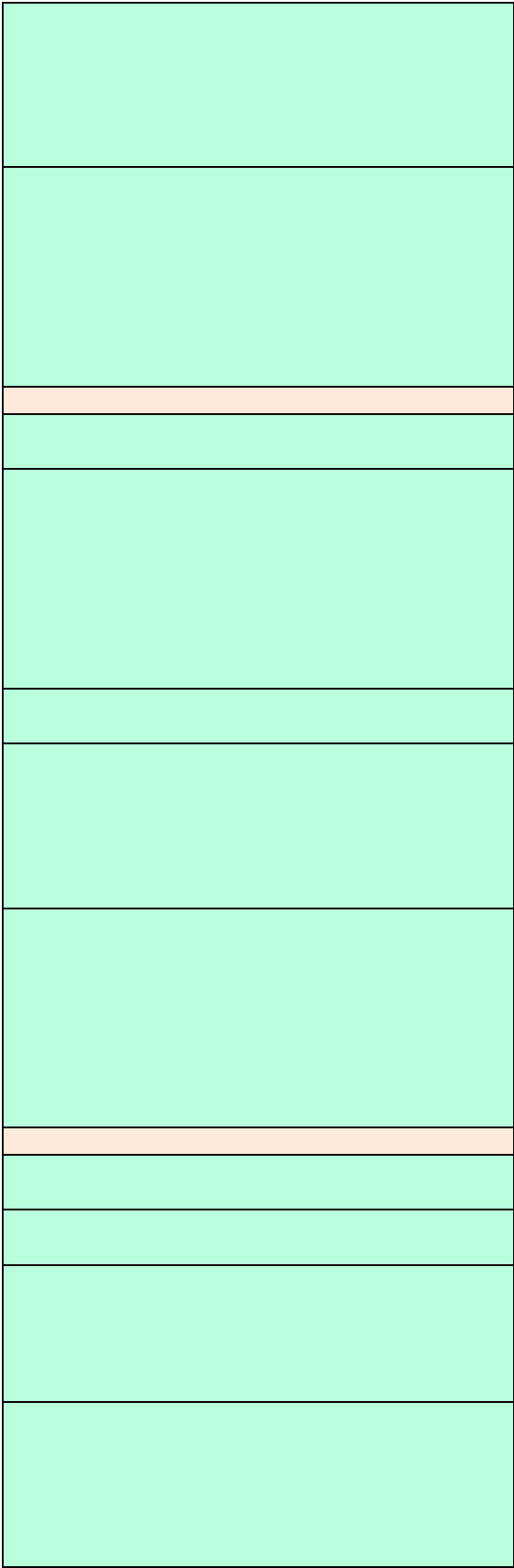


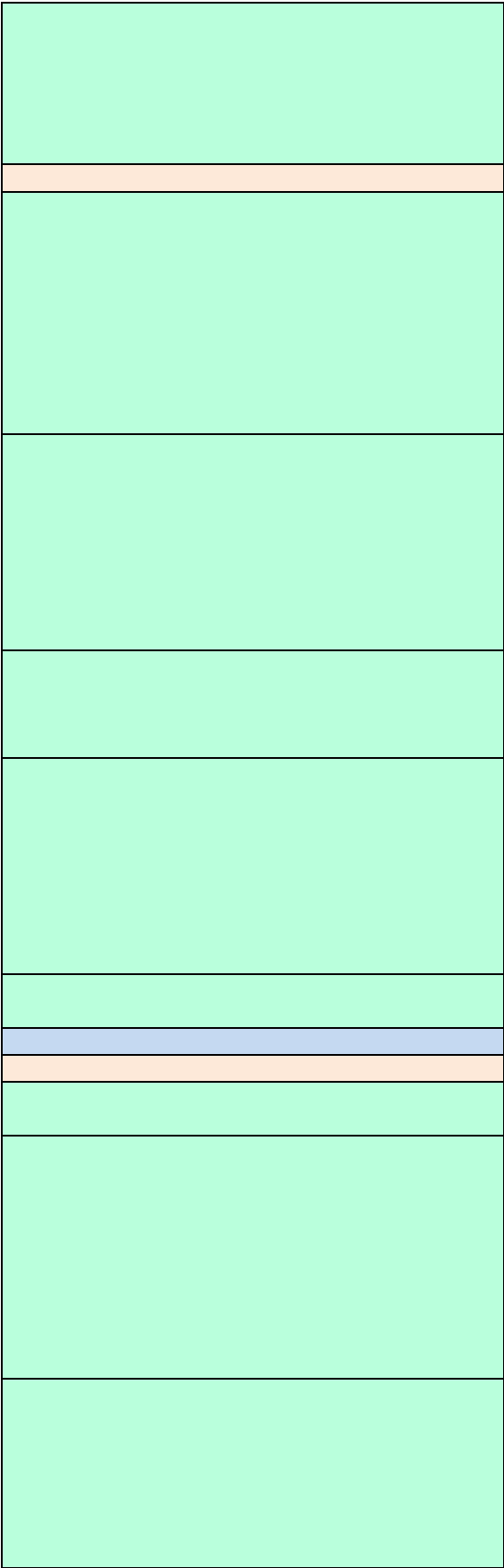


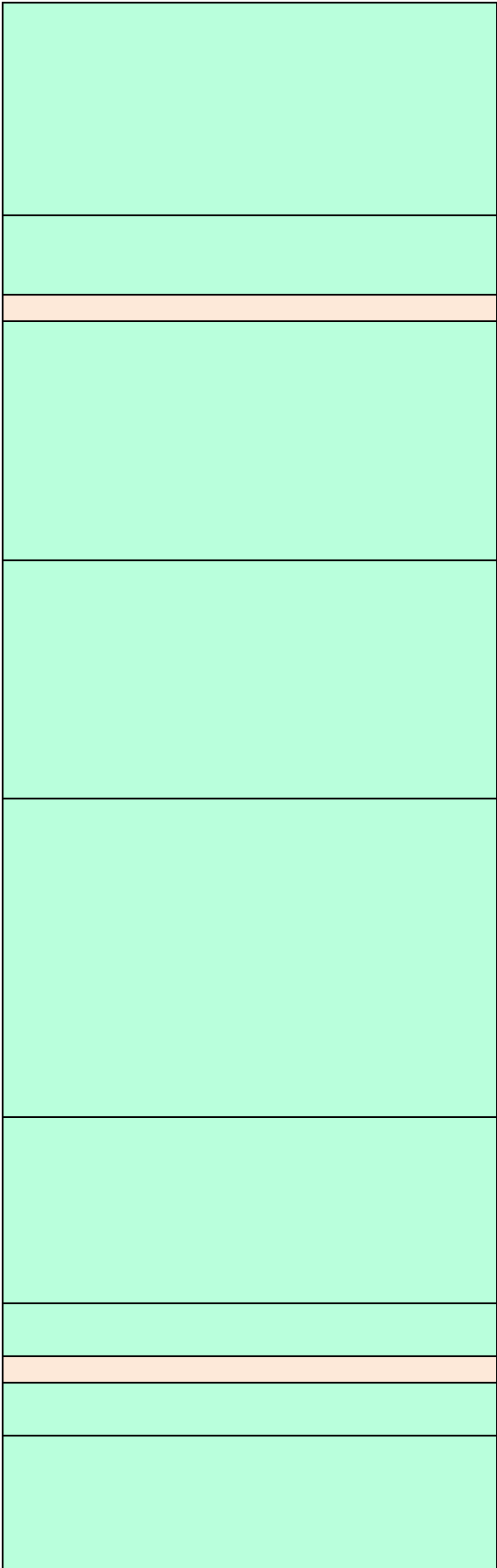




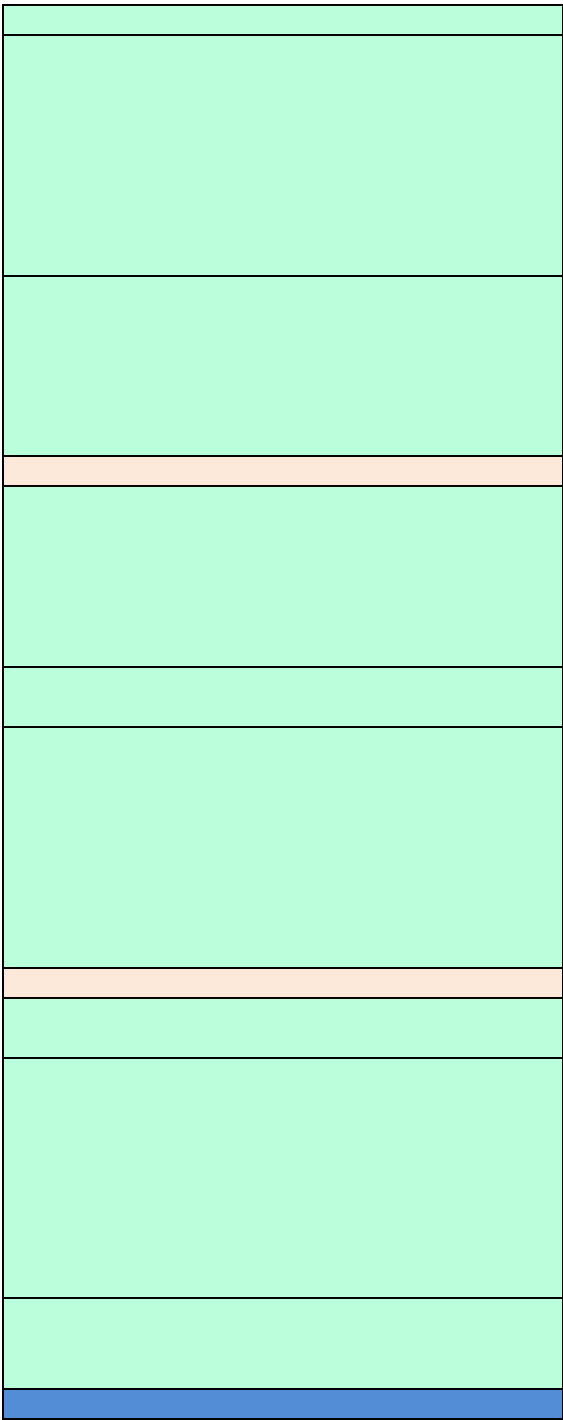






































			c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	<p>a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p> <p>b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p> <p>c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p> <p>d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya</p>	A/B/C/D	A	1	
			d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	<p>a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan</p> <p>b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan</p> <p>c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran</p> <p>d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan</p> <p>e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan</p>	A/B/C/D/E	A	1	
			e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	<p>a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala</p> <p>b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala</p> <p>c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu</p>	A/B/C	A	1	
			f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	<p>a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai</p> <p>b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai</p> <p>c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai</p> <p>d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai</p>	A/B/C/D	B	0.67	

























